



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**BADAN KEUANGAN**

**Jl. Drs. H. Aziz Haily, MA Nagari Sarilamak Kec. Harau**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN**  
**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**NOMOR 08 /BK-LK/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pada Badan Keuangan dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara tahun 1956 No 25);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat yang namanya tersebut pada kolom 2 dengan jabatan yang tersebut pada kolom 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertugas membantu tugas-tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 13 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**IRWANDI, S.Sos.MM  
NIP. 19660913 198603 1 009**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 08 /BK-LK/2020

TANGGAL : 13 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KEGIATAN
1.	<b>Susi Nafiarti, S.Sos</b>	<b>PPTK</b>	1. Penyediaan jasa surat menyurat
2.	Doli Purnanda, S.Sos	Pembantu PPTK	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
			4. Penyediaan alat tulis kantor
			5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
			6. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
			7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			8. Penyediaan peralatan rumah tangga
			9. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan
			10. Penyediaan makanan dan minuman
			11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
			12. Pengadaan peralatan gedung kantor
			13. Pengadaan mebeleur
			14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
			17. Pembuatan Taman di Halaman Gedung
			18. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			19. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran
			20. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
			21. Penyusunan Sistim Informasi Keuangan daerah
			22. Penyusunan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
3.	<b>Masmed, S.Sos</b>	<b>PPTK</b>	23. Penetapan Pajak dan Retribusi
4.	Litra Dewi	Pembantu PPTK	24. Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah & Retribusi daerah
5.	Refmaitra Zurianda	Pembantu PPTK	25. Penyuluhan pajak daerah
6.	Maya Risna, S.Sos	Pembantu PPTK	26. Monitoring rekonsiliasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak
			27. Pendataan, Pemutakhiran dan pengembangan data potensi pajak dan retribusi
			28. Fasilitasi peningkatan kinerja Tim Intensifikasi PBB dan pendapatan daerah
7.	<b>Indra Mangun Sakti, SE, MM</b>	<b>PPTK</b>	29. Penyusunan Ranperda tentang pendapatan daerah (Penagihan)
8.	Wahyu Marmora Samry, SH	Pembantu PPTK	30. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
9.	Dasril, S.Sos	Pembantu PPTK	31. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah
10.	Vivia Susanty Erwandi, SE, MM	Pembantu PPTK	32. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop
			33. Penyusunan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah
			34. Pembinaan dan penertiban pajak daerah

			35. Pemeriksaan pajak daerah
			36. Bimbingan Teknis Pajak Daerah untuk kolektor PBB Nagari dan Jorong
11.	<b>Irwandi, S.Sos. MM</b>	<b>PPTK</b>	37. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
12.	Andra Bellyni, SE	Pembantu PPTK	38. Asistensi Peny.& Rancangan Regulasi Pengelolaan Keu.Kabupaten
13.	Reswita, S,Sos, MM	Pembantu PPTK	39. Inventarisasi dan sinkronisasi data tunjangan profesi guru, DAU, DAK dan DBH
14.	Romi Qadri, S.Kom	Pembantu PPTK	40. Rekonsiliasi dan penyusunan lap. Realisasi penerimaan/pengeluaran DAU, DAK & DBH
			41. Rekonsiliasi data belanja pegawai Kab. Lima Puluh Kota
15.	<b>Susi Febriyanti, SE</b>	<b>PPTK</b>	42. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
16.	Admal, SE	Pembantu PPTK	43. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
17.	Desi Dwi Putri, SE	Pembantu PPTK	44. Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD
18.	Yudi Siswandura, SE	Pembantu PPTK	45. Penyusunan Ranper KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD
			46. Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
			47. Rekonsiliasi Data Akuntansi
			48. Penyusunan Laporan keuangan daerah
19.	<b>Maiyendra, SE. MM</b>	<b>PPTK</b>	49. Penyusunan Standar Satuan Harga
20.	Enita Asmara, S.Sos	Pembantu PPTK	50. Peningkatan Manajemen Aset/barang daerah
21.	Helti Rahmi, S,Sos. MM	Pembantu PPTK	51. Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana
22.	Ridha Mulia, SE	Pembantu PPTK	52. Pemutakhiran data aset daerah
			53. Sistem Informasi manajemen aset daerah
			54. Penyusunan perencanaan barang milik daerah
23.	<b>Ermanto</b>	<b>PPTK</b>	55. Penyusunan Analisa Standar Belanja
24.	Delfianti, SE	Pembantu PPTK	56. Penyusunan Ranperda tentang APBD
25.	M. Farid Wajidi, S.Sos	Pembantu PPTK	57. Penyusunan Ranper KDH tentang Penjabaran APBD
26.	Desi Maifira Zamri, S.Sos	Pembantu PPTK	58. Penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD
			59. Penyusunan Ranper KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
			60. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD
			61. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD
			62. Penyusunan KUA dan PPAS
			63. Penyusunan rancangan kebijakan anggaran daerah
			64. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 13 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEUANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**IRWANDI, S.Sos, M.M**  
**NIP. 19660913 198603 1 009**